



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEMBERIAN KUASA KEPADA
PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS
DAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA MEDAN
TANGGAL: 27-06-2016
KODE/NOMOR: 824/6783

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN
Nomor : 158 / Bg-HK / 2016
TANGGAL : 28-6-2016

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN
Nomor : 158 / Bg-HK / 2016
TANGGAL : 28-6-2016

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 82.6/KEP/2016

TANGGAL : 11 April 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

AG NO, 05304 / BKN / 16

TANGGAL : 28-6-16



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 82.6/KEP/2016

TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :** bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara untuk memperlancar dalam penetapan nomor induk Pegawai Negeri Sipil, persetujuan teknis kenaikan pangkat dan surat keputusan mutasi lainnya perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil, Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat, dan Surat Keputusan Mutasi lainnya Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318),

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi kuasa kepada pejabat Badan Kepegawaian Negara yang namanya tersebut pada lajur 2, pangkat, golongan ruang dan jabatan tersebut pada lajur 3 dan lajur 4, dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing tersebut pada lajur 6 dan lajur 7 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani persetujuan teknis dan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada lajur 5 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA** : Pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU tidak berlaku lagi apabila pejabat yang bersangkutan berhenti / diberhentikan atau dimutasikan pada jabatan lain.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 148/KEP/2014 tanggal 8 Agustus 2014

tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

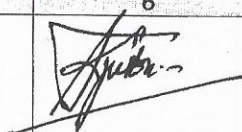
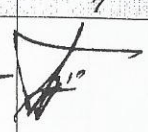
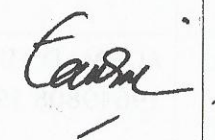
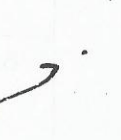
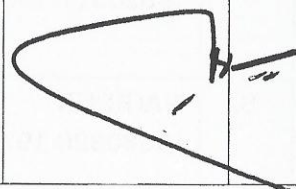
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

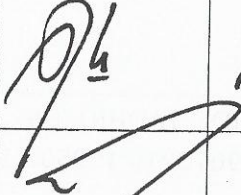
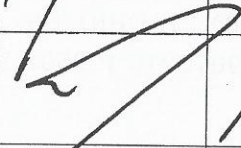
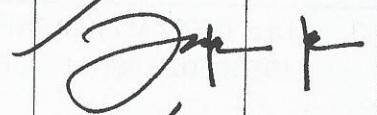
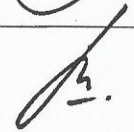
1. Para Menteri Negara;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Kementerian/LPNK;
9. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia;
10. Gubernur/Bupati/Walikota;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Kepala PEKAS Tentara Nasional Indonesia/POLRI;
14. Kepala Biro Keuangan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
15. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
16. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
17. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
18. Kepala Bagian Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

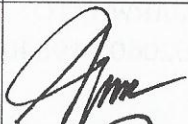
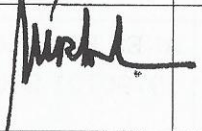
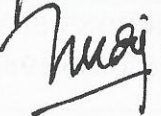
LAMPIRAN I

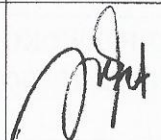
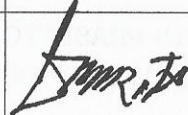
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 82.6/KEP/2016 TANGGAL 11 April 2016
TENTANG

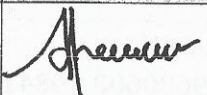
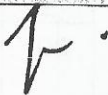
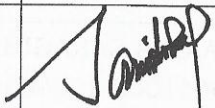
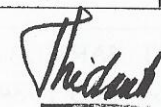
PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI PENETAPAN NOMOR INDUK/PEGAWAI NEGERI SIPIL, PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT, DAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI LAINNYA.

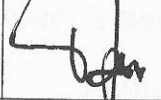
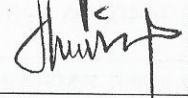
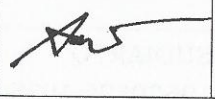
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. S. KUSPRIYOMURDONO, M.Si. 19560909 198110 1 001	Pembina Utama IV/e	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian	- Penetapan NIP. bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; - Penetapan NIP. bagi CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapannya tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Regional BKN; - Persetujuan Kenaikan Pangkat PNS Pusat dan Daerah; - Persetujuan Teknis Peninjauan Masa Kerja PNS; - Pertimbangan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian; - Surat Keputusan pemindahan PNS Pusat antar Kementerian/Lembaga dan PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi PNS Pusat Kementerian/Lembaga; - Petikan Surat Keputusan Kepala BKN tentang kenaikan pangkat IV/c ke atas.		
2.	AIDU TAUHID, S.E., M.Si. 19670210 199503 1 001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Pengadaan dan Kepangkatan	s.d.a.		
3.	Drs. GHOZALI AMIRSYAH, M.Si 19590502 198011 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Kepala Sub Direktorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Utama	s.d.a.		

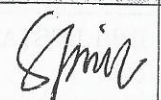
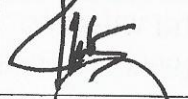
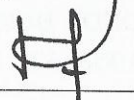
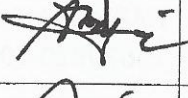
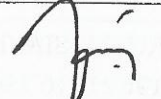
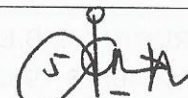
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
4.	Drs. DWI WAHYUDI, M.Si. 19610826 198111 1001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Sub Direktorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara	- Penetapan NIP. bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; - Penetapan NIP. bagi CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penatapannya tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Regional BKN; - Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat PNS Pusat dan Daerah; - Pertimbangan teknis peninjauan masa kerja PNS; - Pertimbangan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian; - Surat keputusan pemindahan PNS Pusat antar Kementerian/Lembaga dan PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi PNS Pusat Kementerian/Lembaga;		
5.	AGUS PRAPTANA, S.Sos., M.AP. 19670818 199703 1 001	Pembina IV/a	Kepala Sub Direktorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama	s.d.a		A
6.	ACHMAD YUSAQ, S.E. 19640808 198603 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Sub Direktorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara	s.d.a		
7.	N. JAMILAH, S.Sos., M.A. 19620517 198403 2 001	Pembina IV/a	Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Non Kementerian	s.d.a		
8.	WAGIRUN 19580820 197801 1 003	Penata Tk. I III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan	s.d.a		

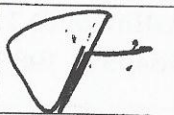
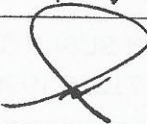
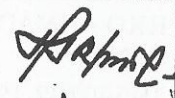
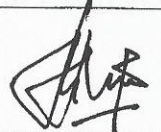
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
9.	SUMARTININGSIH, S.IP 19620627 198412 2 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Pengadaan Kementerian	- Penetapan NIP. bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; - Penetapan NIP. bagi CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penatapannya tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Regional BKN; - Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat PNS Pusat dan Daerah; - Pertimbangan teknis peninjauan masa kerja PNS; - Pertimbangan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian; - Surat keputusan pemindahan PNS Pusat antar Kementerian/Lembaga dan PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi PNS Pusat Kementerian/Lembaga;		f.
10.	MARYONO, S.IP 19700306 199103 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Pengadaan Non Kementerian	s.d.a		y
11.	JOKO PRAWOKO, S.Sos 19650712 198509 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Administrasi Kepangkatan	s.d.a		f.
12.	KUWADI, S.Sos. 19620505 198310 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Administrasi Pengadaan	s.d.a		A
13.	BUDI PRASETYO, S.IP., M.Si. 19691229 199008 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Non Kementerian	s.d.a		y

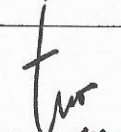
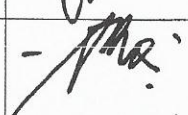
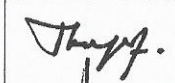
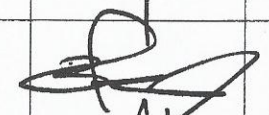
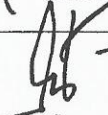
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
14.	R. SUHENRI HENDRAYATNA 19580512 198009 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Mutasi Lain-lain	- Penetapan NIP. bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; - Penetapan NIP. bagi CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penatapannya tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Regional BKN; - Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat PNS Pusat dan Daerah; - Pertimbangan teknis peninjauan masa kerja PNS; - Pertimbangan teknis perbantuan PNS, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali, rehabilitasi, pengesahan/pemutihan, dan perbaikan data kepegawaian; - Surat keputusan pemindahan PNS Pusat antar Kementerian/Lembaga dan PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi PNS Pusat Kementerian/Lembaga;		
15.	SUJARWANTO 19620603 198403 1 001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian	s.d.a		
16.	SUHARTO 19650125 198503 1001	Penata Tk. I III/d	Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian	s.d.a		
17.	ANES BEN PREMANA, S.Kom. 19790721 200812 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Seksi Perekaman Data Pengadaan dan Kepangkatan	s.d.a		
18.	POREDEN SITORUS, S.H. 19630706 198503 1 001	Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Madya	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat dan Daerah.		

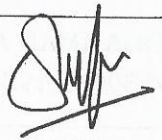
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
19.	Drs. AGUS SETIONO 19630827 198503 1 001	Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Madya	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat dan Derah.		
20.	JUMARI, S.E. 19620304 198303 1 001	Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Madya	s.d.a		
21.	SABAM SITOANG, S.AP. 19620211 198503 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a		
22.	HIDAYAT SUPRIYANTA 19600903 198201 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
23.	Hj. ETTY NURYANTI 19611015 198509 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
24.	ALJANAH 19640418 198403 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
25.	PARTINAH 19640214 198509 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
26.	ANIEK EMBARSARI H. 19650517 198509 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
27.	MURNI WIDAYATI, BBA 19631030 198403 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
28.	BENTRI EKOWATI 19630421 198509 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	sda		
29.	SUDIARTO 19620626 198503 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat dan Derah.		

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
30.	SABIN 19630603 198412 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
31.	HERU ISWANTO 19630924 198312 1 002	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
32.	MARINA SARAGIH 19641008 198403 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
33.	TATI SARTIKA S, S.Sos 19641203 198403 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a		
34.	AHMAD SOFYAN 19631114 198509 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
35.	SUBANDI 19641008 198403 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
36.	SUNINGSIH HARTI 19640909 199103 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
37.	SAHAT SIMANULLANG 19630315 198603 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		
38.	SRI BUDI APRILADEWI, S.AP. 19700411 199103 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Muda	Persetujuan teknis kenaikan pangkat PNS Pusat dan Daerah.		
39.	ANHAR 19630923 198412 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
40.	SETRIANI, S.Sos. 19690401 199103 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a		su
41.	NINING SURYANINGSIH 19660321 198509 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		z
42.	JAMALUDIN 19630913 198503 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		u.
43.	MOHAMMAD TAKDIR 19640520 198502 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		g
44.	RIZAL FAZRI 19620824 198502 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		P
45.	APRIZAL 19640415 198503 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		ai
46.	WINARTI 19730111 199803 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	s.d.a		g
47.	DIAN SUSANTI R. 19671226 199009 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		fu
48.	EKO AHMAD MIKOYANTO, S.Sos. 19640702 198412 1 001	Penata Tk.I III/d	Analisis Kepegawaian Madya	- Penetapan NIP. bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; - Penetapan NIP. bagi CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP. tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg. BKN		g

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
49.	DWI LESTARI PUDJI ASTUTI, S.E. 19630409 198412 2 001	Penata Tk.I III/d	Analisis Kepegawaian Muda	- Penetapan NIP. bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; - Penetapan NIP. bagi CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP. tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg. BKN		
50.	SRI BUDIHATMI, S.E. 19620612 198403 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a.		
51.	TRI WIHARTO 19620510 198603 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
52.	DEDE HERMAN, S.E. 19630422 198603 1 001	Penata Tk.I III/d	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a.		
53.	HASMANAH 19630820 198412 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
54.	RUSMI SIANIPAR 19621016 198403 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
55.	RUSTIPAN, S.E. 19640508 198503 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Muda	s.d.a.		
56.	PAWIT ENDANG SRI WIDATI 19630520 198509 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
57.	RAHMAN SUTARNO 19631007 198603 1 002	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
58.	ROSNAULI SILALAH 19630320 198403 2 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	- Penetapan NIP. bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; - Penetapan NIP. bagi CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP. tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg. BKN.		
59.	MOHAMMAD AZIS 19630916 198503 1 001	Penata Tk. I III/d	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
60.	RAHMAT HIDAYAT 19640222 198603 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
61.	KARTINAH 19631102 198412 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
62.	ABDULLAH H. 19630414 198303 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
63.	SRI RAHAYU 19630419 198403 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
64.	MUSLIH 19630220 198502 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
65.	JANNUS PANGARIBUAN 19630108 198412 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
66.	LANDUNG KRISDWIYANTA 19651022 199103 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		
67.	SRI ERIN RUSYATININGSIH 19631110 198412 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a.		

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
68.	SALIMI 19640503 198509 2 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	- Penetapan NIP. bagi CPNS Pusat/PNS Pusat; - Penetapan NIP. bagi CPNS Daerah/PNS Daerah yang kewenangan penetapan NIP. tidak diserahkan kepada Kepala Kanreg. BKN		
69.	BAMBANG MUJIONO 19630506 198502 1 001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Penyelia	s.d.a		

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,




BIMA HARYA WIBISANA